

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan jasmani dan rohaninya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14. Menurut Suardi dan Samad (dalam Anggraeni 2021, hlm. 498), pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar karena sangat menentukan perkembangan anak di masa depan dan ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Hal ini yang mendasari bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang karena kondisi fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami kelainan dan penyimpangan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, intelektual, sosial dan emosionalnya dibanding dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak seusianya, sehingga mereka memerlukan adanya pelayanan pendidikan khusus (Ariani 2022, hlm. 49).

Anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya dalam mendapatkan layanan pendidikan. Dalam hal pendidikan, anak berkebutuhan khusus dapat terpenuhi dengan adanya program pendidikan segregasi atau yang biasa disebut dengan SLB (Sekolah Luar Biasa). Pendidikan segregasi merupakan lembaga pendidikan yang disediakan hanya

untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Namun sejak tahun 2003 sudah mulai terdapat rintisan sekolah dengan program pendidikan inklusi dimana sistem pendidikan tersebut tersedia untuk semua anak dengan tetap memperhatikan anak yang berkebutuhan khusus.

Dengan adanya sekolah inklusi, akan meminimalisir adanya diskriminasi antar anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya (normal). Hal ini dikarenakan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya terjalin hubungan sosial yang cukup baik, tidak memandang rendah satu sama lain, saling menghormati dan saling menghargai. Dengan begitu, anak berkebutuhan khusus pun akan merasa dihargai sehingga dapat mengembangkan kemampuan sosial dan rasa percaya dirinya.

Kurikulum inklusi menurut Halimah (dalam Nasution 2017, hlm. 93) adalah kurikulum yang mengutamakan kepentingan atas keberagaman kondisi setiap anak. Dalam pendidikan inklusi bukan anak yang menyesuaikan diri dengan kurikulum, akan tetapi kurikulumlah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap anak berkebutuhan khusus. Proses pelaksanaan pendidikan diperlukan adanya kurikulum yang berlaku secara nasional sebagai pedoman dalam mengimplementasi setiap program pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 4 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas berisi tentang penyediaan akomodasi yang layak dilakukan paling sedikit melalui penyediaan anggaran dana; penyediaan sarana dan prasarana; penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan penyediaan kurikulum. Mudjito, dkk., (dalam Sebrina dan Sukirman 2018, hlm. 104), mengemukakan bahwa pada dasarnya kurikulum yang digunakan pada sekolah inklusi sama saja dengan sekolah reguler yaitu menggunakan kurikulum nasional (kurikulum 2013), namun kurikulum tersebut dimodifikasi agar menyesuaikan dengan kebutuhan

anak berkebutuhan khusus atau pada sekolah inklusi biasa disebut dengan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).

Kurikulum pendidikan khusus yang digunakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus di PAUD adalah kurikulum 2013 PAUD yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus Pasal 8 ayat 1.

Proses implementasi kurikulum pendidikan inklusi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor pendukung diantaranya adalah dengan adanya tenaga pendidik yang memadai (guru pembimbing khusus), keterlibatan dukungan orangtua, adanya kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan PDBK dalam kegiatan pembelajaran. Adapun faktor penghambat adalah kurangnya pengetahuan guru dalam penanganan terhadap PDBK, faktor biaya yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang tidak menunjang untuk PDBK, serta kurangnya pengetahuan dan keterlibatan orangtua dalam membimbing anak berkebutuhan khusus (Chopra 2018, hlm. 10).

Taman Kanak-kanak Al-Muhajirin merupakan salah satu lembaga satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan program pendidikan inklusi dengan jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) sebanyak 9 anak dengan berbagai kualifikasi, diantaranya 1 anak penyandang *down syndrome*, 5 anak penyandang autisme dan 3 anak dengan hambatan *speech delay*. Sistem pendidikan inklusi di TK Al-Muhajirin berjalan secara terstruktur. Hal ini dapat dilihat dari segi kualitas pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, terdapat fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang cukup menunjang pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus atau PDBK, keterlibatan orangtua dalam kegiatan sosialisasi seperti *parenting*,

adanya dukungan dari yayasan, serta perancangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PDBK, .

PDBK di TK Al-Muhajirin ini berjumlah cukup banyak yang artinya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus percaya bahwa sekolah tersebut memang sangat baik dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi ini. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti melakukan kajian lebih lanjut terhadap implementasi kurikulum pendidikan inklusi di TK Al-Muhajirin dengan judul “Implementasi Kurikulum Pendidikan Inklusi Di TK Al-Muhajirin Cilegon”.

B. Rumusan Masalah

Kurikulum pendidikan inklusi menurut Halimah (dalam Nasution 2017, hlm. 93) adalah kurikulum yang mengutamakan kepentingan atas keberagaman kondisi setiap anak dimana kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap anak berkebutuhan khusus. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi tentu diperlukan adanya kurikulum sebagai acuan supaya pelaksanaan pendidikan inklusi berjalan secara terstruktur, sehingga tujuan pendidikan inklusi dapat tercapai secara optimal.

Implementasi kurikulum pendidikan inklusi di TK Al-Muhajirin Cilegon berjalan secara terstruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di TK Al-Muhajirin cukup banyak yang artinya orangtua dari PDBK tersebut mempercayai lembaga tersebut sebagai lembaga penyelenggara pendidikan inklusi. Dengan demikian, maka rumusan masalah dapat diungkapkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tahap perencanaan kurikulum pendidikan inklusi di TK Al-Muhajirin ?

2. Bagaimana tahap pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusi di TK Al-Muhajirin ?
3. Bagaimana tahap evaluasi kurikulum pendidikan inklusi di TK Al-Muhajirin ?

C. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Diketuainya tahap perencanaan kurikulum pendidikan inklusi di TK Al Muhajirin.
2. Diketuainya tahap pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusi di TK AL-Muhajirin.
3. Diketuainya tahap evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusi di TK Al-Muhajirin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan melakukan penelitian ini akan diketahui bagaimana perencanaan kurikulum pendidikan inklusi, implementasi kurikulum pendidikan inklusi dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam mengimplementasi kurikulum program pendidikan inklusi di TK Al-Muhajirin. Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Menambah wawasan dan pengalaman untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian kurikulum pendidikan inklusi serta dalam melaksanakan penelitian khususnya dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum pendidikan inklusi pada Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Menambah wawasan bagi para guru dalam perencanaan, pengimplementasian dan evaluasi kurikulum pendidikan inklusi.
- c. Menjadi referensi bagi peneleiti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan tema yang sama namun dari sudut pandang berbeda.

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada penelitian ini terdapat lima bagian. Bagian pertama yaitu ada bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah terkait alasan peneliti mengambil tema yang akan diteliti. Selain itu, pada bab ini memuat rumusan masalah yaitu pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan penelitian agar pembahasan dalam skripsi tersebut tidak meluas dari tema. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang memuat tentang tujuan dilakukannya penelitian tersebut dan menjawab dari pertanyaan yang telah dipaparkan. Kemudian ada manfaat penelitian yang memuat tentang manfaat atau dampak positif yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Bagian terakhir yaitu sistematika penulisan.

Bagian kedua yaitu bab dua berisi kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan mengenai sumber rujukan yaitu studi literatur, kajian teori-teori dan dalil-dalil yang mendukung tema yang diambil yaitu “Implementasi Kurikulum Pendidikan Inklusi di TK Al-Muhajirin Cilegon”. Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang akan diteliti.

Bagian ketiga yaitu bab tiga berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan mengenai desain penelitian yang digunakan dalam melakukakn penelitian. Selanjutnya partisipan yang terlibat dalam proses penelitian, subjek

penelitian dan tahap perolehan data penelitian. Bagian keempat yaitu ada bab empat berisi tentang temuan dan pembahasan. Pada bab ini berisi pemaparan mengenai temuan atau hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

Bagian terakhir ada bab lima berisi tentang simpulan dan rekomendasi. Pada bab ini peneliti memaparkan tentang kesimpulan dari pembahasan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Rekomendasi bertujuan untuk memberi saran yang ditujukan kepada objek penelitian dan bagi peneliti selanjutnya.